

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Hukum

PBI No.11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum. Serta PBI No.12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Pedangang Valuta Asing Bukan Bank. Kepala Biro Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020, tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia sebagai Dampak Pandemi COVID-19, ditetapkan 2020; pedoman operasional BI termasuk kantor perwakilan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 12/20/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Penerbit Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, diundangkan 12 Januari 2023, 45–52.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, ditetapkan 17 Mei 1999; dasar hukum bank sentral Indonesia, termasuk eksistensi kantor perwakilan BI.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), mulai berlaku 2023; memperkuat peran BI dalam stabilitas sistem keuangan.

UU No. 6 Tahun 2009: Undang-Undang Bank Indonesia (UU BI), “Mengatur teknis organisasi, tata kerja, dan pelaksanaan program kerja kantor perwakilan”, 23 Januari 2025

UU No. 8 Tahun 2010: Presiden Republik Indonesia, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” 29 Januari 2026.

UU No. 8 Tahun 2010: Undang-Undang Republik Indonesia, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” 29 Januari 2026.

UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang OJK, sebagian fungsi pengawasan perbankan mikprudensial dialihkan ke OJK; BI tetap memiliki kewenangan moneter dan sistem pembayaran.

UU Nomor 8 Tahun 2010: Republik Indonesia, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 1 angka 1 serta Pasal 37–44,” di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

UU Nomor 8 Tahun 2010: Republik Indonesia, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 1 angka 1 serta Pasal 17–22,” di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

UU Nomor 8 Tahun 2010: Republik Indonesia, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya Pasal 1 angka 1 serta Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4,” di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

Tesis

Husein, Yusuf. “Implementasi undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor perbankan,” *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 20.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Nurkholis selaku Kepala Unit Manajemen Intern KPw Bank Indonesia Cirebon, Wawancaraa oleh Penulis, Pada hari Senin, 26 Januari 2026.

Wawancara Pra Observasi dengan Ibu Fitria, unit (bagian) Kepatuhan Khusus (UHK) kantor perwakilan (KPW) bank Indonesia (BI) Cirebon, pada hari Selasa Tanggal 10 Juni 2025.

Buku

Asikin, Zainal. *Hukum Perbankan di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 49-56.

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 20021), 21–27.

- Bank Indonesia, *Peraturan Dewan Gubernur dan pedoman internal Bank Indonesia mengatur struktur organisasi dan prosedur kantor perwakilan*, 20 Oktober 2025.
- Edy, Agung. *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*, (Penerbit Insania, 2021), 40.
- Huda, Nurul dan Heykal, Mohamad. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2019), 75–83.
- Indonesia Cirebon, Bank. *Profil Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon*, (Cirebon: KPw BI Cirebon, 2022), 7–8.
- Indonesia, Bank. *Arsip Digital De Javasche Bank dan Peran Kantor Cabang Daerah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 56.
- Indonesia, Bank. *Bank Indonesia dalam Lintasan Sejarah Nasional*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2020), 134.
- Indonesia, Bank. *Koordinasi Kebijakan Ekonomi Daerah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 14 April 2022), 6–13.
- Indonesia, Bank. *Koordinasi TPID dan TP2DD*, (Jakarta: Bank Indonesia, 20 Februari 2024), 6–13.
- Indonesia, Bank. *Landasan hukum KPw BI Cirebon berdasarkan UU BI, PBI, dan peraturan internal BI memastikan legalitas operasional di wilayah Ciayumajakuning*, 27 November 2025, bi.go.id
- Indonesia, Bank. *Museum Bank Indonesia: Sejarah Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2021), 41–43.
- Indonesia, Bank. *Nilai-Nilai Strategis dan Tata Kelola Organisasi* (Jakarta: Bank Indonesia, 7 April 2018), 2–4
- Indonesia, Bank. *Pedoman Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)* (Jakarta: Bank Indonesia, 5 Agustus 2020), 10–14.
- Indonesia, Bank. *Pengelolaan Uang Rupiah* (Jakarta: Bank Indonesia, 10 Juni 2019), 6–9.
- Indonesia, Bank. *Pengelolaan Uang Rupiah*, (Jakarta: Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, 12 Februari 2023), 10–19.

- Indonesia, Bank. *Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam Perekonomian Daerah* (Jakarta: Bank Indonesia, 12 Februari 2021), 3–6.
- Indonesia, Bank. *Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/1/PBI/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2019), 1–30.
- Indonesia, Bank. *Profil dan Tujuan Bank Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 15 Januari 2020), 1–3
- Indonesia, Bank. *Profil Kantor Perwakilan Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 15 Januari 2023), 1–5.
- Indonesia, Bank. *Program Digitalisasi Pembayaran dan QRIS*, (Jakarta: Bank Indonesia, 10 Januari 2023), 15–22.
- Indonesia, Bank. *Program Kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon*, (Jakarta: Bank Indonesia, 15 Februari 2024), 1–5.
- Indonesia, Bank. *Program Literasi Rupiah CBP*, (Jakarta: Bank Indonesia, 24 Maret 2022), 5–12.
- Indonesia, Bank. *Program Pengembangan UMKM dan Inklusi Keuangan* (Jakarta: Bank Indonesia, 18 November 2022), 8–12.
- Indonesia, Bank. *Program Serambi Rupiah Ramadan dan Idul Fitri*, (Jakarta: Bank Indonesia, 27 Maret–20 April 2023), 3–9.
- Indonesia, Bank. *Sejarah Bank Indonesia: Dari De Javasche Bank ke Bank Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, Edisi Revisi Digital, 2020), 92.
- Indonesia, Bank. *Sistem Pembayaran dan Digitalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Bank Indonesia, 18 Agustus 2023), 22–30.
- Indonesia, Bank. *Sistem Pembayaran di Indonesia* (Jakarta: Bank Indonesia, 20 Maret 2021), 4–7.
- Indonesia, Bank. *Stabilisasi Moneter pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia*, (Jakarta: Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, 2021), 29–31.
- Indonesia, Bank. *Stabilitas Sistem Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia, 30 November 2022), 7–14.
- Indonesia, Bank. *Strategi Program Kerja Kantor Perwakilan BI Cirebon*, (Jakarta: Bank Indonesia, 15 Februari 2024), 1–9.

- Indonesia, Bank. *Tugas dan Fungsi Bank Indonesia di Daerah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 1 Desember 2020), 3–9.
- Jasa Keuangan, Otoritas. *Buku pintar Industri Keuangan Non Bank Syariah Indonesia*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2021), 10-13.
- Nugroho, Riant. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2020), 54-59.
- R. Dye, Thomas. *Understanding Public Policy*, (Boston: Pearson, 2013), 3.
- Ramadhan et al., *Metode penelitian*, (Cipta Media Nusantara, 2021), 34.
- Suardi Wekke, Ismail. *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), 15.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 17-18.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2020), 49–60.
- Syahza, Almasdi. *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: 2021), 26
- Warjiyo, Perry dan M. Juhro, Solikin. *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 1–5.
- Zuriah, Nuriah. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 217.

Skripsi

- Haloho, Christian. “Perspektif Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Sanksi Pidana Pencucian Berasal Dari Tindak Pidana Korupsi,” (Skripsi Universitas Islam Kalimantan, 2023): 10.
- Joana, Chinde Kusuma Negara. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2019): 5.

Jurnal

Adlini et al., “Metode penelitian kualitatif studi pustaka,” *Jurnal Edumaspul*, 6:1 (2022): 974-980.

Asri Puanandini, Dewi. “Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 2: 2 (2023): 40.

Aulia Rahmi, Zhafira. “Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Melaporkan Adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Klien,” *Journal Elektronik Universitas Negeri Malang* 4:1 (2019): 197.

Aurelia Justitia Sasube, Zefanya. “Peran Perbankan Indonesia Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex Crimen*, 13:3 (2025): 46.

Ayny Mufidah, Nur et al, “Pencucian Uang di Indonesia: Analisis dan Perspektif Islam,” *Jurnal Kajian Hukum* 1: 3 (2025): 267, 269.

Ayu Lestari, Megha. “Analisis Upaya Bank Indonesia dan Hukum Perbankan Indonesia dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Bank Mega,” 8:2 (2024): 16.

Ayu Pratitis, Sugih et al., “Larangan Riba dan Gharar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Maqasid Al-Syariah,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4:1 (2026): 4637,4639.

Daim Harahap, Rahmat. “Analisis Pencegahan Praktik Pencucian Uang (Money Laundering) Melalui Penerapan Know Your Customer Principle Pada Bank Sumut Syariah,” *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2:1 (2022): 7.

Denniagi, Erma. “Analisis Ke-Ekonomian Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Lex Renaissance* 2: 6 (2021): 246.

Dewi Megasari, Indah et al., “Maysir, Gharar, dan Riba dalam Perbankan Syariah” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 16:3 (2026): 504-507.

- Dwi Hartanti, Juwita. "Strategi Perbankan Indonesia dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Media Hukum Indonesia* 2: 4 (2024): 159.
- Dwi Putra, Rizky. "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perbankan," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum Al Zayn* 2: 1 (2024): 77-78. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>
- Eli Zaluchu, Sonny. "Metode Penelitian di dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3: 2 (2021): 257.
- Elsera, Rivanda. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia," *Journal Equitable* 5: 1 (2020): 2.
- Faslah, Romi et al., "Pencucian Uang di Indonesia: Analisis dan Perspektif Islam," *Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1:3 (2025): 41-45.
- Faslah, Romi. "Pencucian Uang di Indonesia: Analisis dan Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Kewarganegaraan* 1:3 (2025): 78.
- Faslah, Romi. "Pencucian Uang di Indonesia: Analisis dan Perspektif Islam," *Jurnal Hukum Kewarganegaraan*, 1:3 (2025): 19.
- Febriani et al., "Analisis data dalam penelitian tindakan kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1:2 (2023): 140-153.
- Gilang Rifai, Aditya et al, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Islam: Analisis Teoritis Dan Studi Kasus Di Indonesia" *Jurnal Hukum* 14: 5 (2025): 10.
- Harta Hutagalung, Yuli. "Kajian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010," *Syariah Jurnal Ilmu Hukum* 1:1 (2023): 43.
- Herawati, Helmi. "Pentingnya laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan Perusahaan," *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz* 2:1 (2019): 16-25.
- Husein, Yunus. "Arti Penting Rezim Anti Pencucian Uang Bagi Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 11: 1 (2021): 3-4.
- Jovena Limaatmaja, Paskalis. "Aspek Pidana Terhadap Transaksi Mata Uang Kripto Yang Berpotensi Sebagai Tempat Pencucian Uang," *Jurnal Positivis* 2: 4 (2024): 511.

- Julianti Manihuruk, Pronika. "Peran Perbankan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Nasabah," *Journal of education Humaniora and sosial sciences* 3:2 (2020): 13.
- Kaniyawati, Sinta. "Strategi Perbankan Indonesia Menanggulangi Pencucian Uang," *Hukum Indonesia* 4: 2 (2023): 161.
- Imi, Musfiratul. "Tantangan Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Cryptocurrency Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Eliqtishady* 7:3 (2025): 33.
- Lololangi, Iffandie. "Kajian Yuridis Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor12/20PBI/2010 Tentang Penerapan Program Anti Pncucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Prekreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah," *Diponegoro Law Review* 5: 2 (2019): 119.
- Muannif et al., "Pentingnya penerapan literature review pada penelitian ilmiah," *Jurnal Masohi* 2:1 (2021): 42-51.
- Naufal Fadhillah, Haidar et al, "Analisis Pencucian Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Antara Etika Dan Regulasi," *Jurnal Best* 1: 2 (2025): 75, 76.
- Nugroho, Nur. "Analisis Terhadap Pencegahan Tindak pidana Pencucian Uang Oleh Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang TPPU," *Mercatoria* 9: 2 (2020): 127,131.
- Nur Hidayah, Fenty. "Analisis Yuridis Terhadap Kasus Pencucian Uang (Money Laundering): Perspektif Hukum Perbankan Indonesia," *Jurnal Sains Student Research* 3: 1 (2025): 147.
- Nurhidayat, Muhammad et al., "Prinsip syariah keadilan, transparansi, dan amanah: Implikasi Gharar, Maysir, dan Riba terhadap Praktik Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum Islam* 10:2 (2025): 34-35.
- Pinem, Jeslyn. "Kedudukan Hukum Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009," *Lex Privatum* 9: 12 (2021): 184.

- Putu Mira Fajarin, Ayu. "Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme," *Jurnal Kontruksi Hukum* 3: 1 (2022): 106.
- Rahayuningsih, Toetik. "Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Perbankan Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Rechtide* 8: 2 (2019): 9.
- Raihana, "Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana Dan Perkembangan Teknologi," *Seikat* 2: 3 (2023): 350-351.
- Rudi Setiawan, M. "Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Journal Diversi* 3: 2 (2017): 139.
- Sulisto, Hartono. "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Serikat* 2: 3 (2019): 191.
- Sumadi, Sumadi. "Manajemen Bank Syariah Dalam Upaya Pencegahan Pencucian Uang dan Uang Haram (Studi Kasus di Perbankan Syariah Mah Solo Raya)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2:3 (2022): 51.
- Waliya Nuraini, Rina. "Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Berbasis Know Your Customer (KYC) Dalam Implikasi Dan Resolusi Hukum Perbankan," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5: 4 (2024): 241.
- Wigati, Sri. "Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia dan Kepatuhan terhadap Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah* 7: 2 (2024): 27.
- Yasmin, Inge. "Analisis Yuridis Aturan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Transaksi Perbankan," *Jurnal Ekonomi Perbankan* 4: 1 (2020): 5.
- Yuniarti, Sesar. "Kebijakan Formulasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," *Pandecta* 7: 1 (2019): 105.

Yustia Okta, Pradini et al, “Peran Dan Tanggung Jawab Bank Dalam Mengatasi Tindak Kejahatan Pencucian Uang,” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1: 4 (2024): 328. <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i4.1776>

Sumber dari (Website)

Bank Indonesia juga memiliki tugas dalam pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran dan risiko sistem keuangan untuk menjaga kelancaran kegiatan lembaga keuangan serta mencegah gangguan sistemik. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240326/9/1751773/pengertian-bank-sentral-beserta-tugas-fungsi-dan-wewenangny> di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 tahun 2024 tentang penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pihak yang Diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102024.aspx di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

Penjelasan latar belakang dan materi pokok peraturan BI tersebut, termasuk APU PPT PPSPM https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_102024.aspx di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang *Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal* – <https://www.peraturan.go.id/id/peraturan-bi-no-10-tahun-2024> di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi pihak yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/313425/peraturan-bi-no-10-tahun-2024> di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

Peraturan Bank Nomor 10 Tahun 2004

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/313425/peraturan-bi-no-10-tahun-2024> di akses pada tanggal 30 Januari 2026.

PPATK, informasi kewajiban pelaporan transaksi dan peran pihak pelapor (lembaga keuangan) dalam rezim APU/PPT, <https://www.ppatk.go.id/>

PPATK, *Modus Pencucian Uang* / pedoman dan publikasi edukasi terkait TPPU <https://www.ppatk.go.id/>



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON